



Diskursus Foucault Dalam Bergabungnya Indonesia ke BRICS

Foucault's Discourse on Indonesia's Joining BRICS

Elisa Tandokallo

Program Studi Hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan

*Corresponding Author: E-mail: tandokalloelisa@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 07 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

Kata Kunci:

Diskursus, Foucault, BRICS, Kebijakan Luar Negeri, Tatanan Dunia Yang Multipolar

Keywords:

Discourse, Foucault, BRICS, Foreign policy, Multipolar world order

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7483

ABSTRAK

Michel Foucaults di kenal sebagai Filsuf yang di kategorikan ke dalam posmodernisme. mengexplorasi BRICS dari pemikiran Foucaults masalahnya adalah bagaimana wacana tentang kekuatan ekonomi dan politik global dikonstruksi dan direproduksi dalam keputusan Indonesia untuk masuk BRICS. Foucault menawarkan ide filosofis bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif melalui produksi wacana. Ketertarikan terhadap topik ini muncul karena BRICS bukan sekadar blok ekonomi, tetapi juga medan pertarungan wacana global. Dengan demikian, bergabungnya Indonesia ke BRICS adalah ekspresi dari resistensi diskursif dan afirmasi identitas global baru. Foucault membantu mengungkap bagaimana relasi kuasa bekerja di balik keputusan strategis ini, melampaui sekadar kepentingan ekonomi.

ABSTRACT

Michel Foucault is known as a philosopher who is categorized as postmodernism. Exploring BRICS from Foucault's thoughts, the problem is how discourses about global economic and political power are constructed and reproduced in Indonesia's decision to join BRICS. Foucault offers a philosophical idea that power is not only repressive, but also productive through the production of discourse. Interest in this topic arises because BRICS is not just an economic block, but also a global discourse battleground. Thus, Indonesia's joining BRICS is an expression of discursive resistance and affirmation of a new global identity. Foucault helps reveal how power relations work behind this strategic decision, beyond mere economic interests.

PENDAHULUAN

Transformasi tatanan dunia global pasca-Perang Dingin ditandai dengan kemunculan kekuatan-kekuatan alternatif yang mencoba menyeimbangkan dominasi negara-negara Barat. Salah satu bentuk konkrit dari dinamika ini adalah pembentukan BRICS blok strategis yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang kemudian mulai membuka

ruang bagi perluasan keanggotaan, termasuk minat Indonesia untuk bergabung.

BRICS tidak hanya berfungsi sebagai forum kerja sama ekonomi, tetapi juga sebagai wacana alternatif terhadap sistem internasional berbasis unipolaritas. Keputusan Indonesia untuk terlibat dalam inisiatif ini menarik untuk dianalisis secara kritis, bukan semata-mata sebagai kebijakan luar negeri pragmatis, melainkan juga sebagai manifestasi dari konstruksi identitas global melalui bahasa dan simbol politik. Dalam konteks ini, pendekatan diskursus Michel Foucault memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk mengkaji bagaimana kekuasaan dan pengetahuan bekerja dalam membentuk makna dan keputusan geopolitik.

Foucault (1972) berargumen bahwa diskursus bukan hanya representasi dari kenyataan, melainkan mekanisme yang memproduksi realitas sosial dan menentukan batas-batas pemikiran yang sah. Dengan kata lain, narasi yang digunakan oleh aktor politik dalam menjelaskan langkah-langkah strategisnya bukanlah netral, melainkan sarat dengan kepentingan kuasa. Dalam hal ini, narasi Indonesia mengenai BRICS sebagai "kemitraan yang setara" dan "alternatif terhadap dominasi Barat" mencerminkan upaya produksi makna yang tidak terlepas dari logika kekuasaan global. Sebagaimana dijelaskan oleh Neumann (2008), politik luar negeri suatu negara selalu terikat dengan proses diskursif yang membentuk identitas nasional dan peran internasionalnya. Oleh karena itu, analisis terhadap wacana menjadi penting untuk memahami bagaimana negara seperti Indonesia mengonstruksi dirinya dalam hubungan internasional.

Untuk itu, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis wacana Foucauldian sebagai metode utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak sekadar memetakan isi kebijakan luar negeri Indonesia, melainkan juga menelusuri bagaimana diskursus mengenai BRICS diartikulasikan, didistribusikan, dan di institusionalisasikan. Fokus analisis diarahkan pada teks-teks seperti pidato kenegaraan, dokumen diplomatik, liputan media, dan opini publik yang membentuk narasi dominan tentang BRICS. Dalam perspektif Foucault, teks-teks ini bukan sekadar alat komunikasi, melainkan medan pertarungan kuasa di mana aktor-aktor negara berusaha membentuk "rezim kebenaran" yang mendukung agenda geopolitiknya (Foucault, 1980).

Lebih jauh lagi, bergabungnya Indonesia ke BRICS dapat dipahami sebagai bagian dari praktik "governmentality" konsep yang dikembangkan Foucault untuk menjelaskan bagaimana negara mengatur populasi dan mengelola diri melalui teknik-teknik diskursif dan institusional. Dalam konteks ini, partisipasi Indonesia dalam BRICS bukan hanya langkah strategis, tetapi juga bentuk pengelolaan identitas nasional sebagai bagian dari komunitas global non-Barat yang berdaya dan mandiri. Seperti dikatakan oleh Joseph (2010), diskursus governmentality dalam hubungan internasional dapat membantu menjelaskan bagaimana negara-negara membentuk strategi berdasarkan narasi tertentu yang menyasar identitas kolektif dan legitimasi.

Dengan demikian, pendahuluan ini menggarisbawahi bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dapat dilihat sebagai praktik diskursif yang melibatkan konstruksi identitas, reproduksi kekuasaan, dan negosiasi makna di tingkat global. Melalui lensa Foucault, kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari relasi pengetahuan dan kekuasaan yang membentuknya. Penelitian ini bertujuan untuk membuka ruang interpretasi baru dalam studi hubungan internasional, terutama dalam memahami bagaimana wacana membentuk dan dibentuk oleh praktik politik luar negeri negara berkembang dalam menghadapi dominasi global.

TINJAUAN LITERATUR

Teori Diskursus Michel Foucault

Michel Foucault membagi konsepnya ke dalam sejumlah kategori utama, salah satunya adalah konsep kekuasaan/pengetahuan (*power/knowledge*). Konsep ini menjadi pondasi untuk memahami bagaimana diskursus bekerja dalam membentuk realitas sosial dan politik.

Wacana

Menurut Foucault, wacana bukan sekadar diskusi, tetapi sistem cara berpikir, berbicara, dan menulis yang dilembagakan dan membentuk realitas. Dalam bukunya *The History of Sexuality*, Foucault menegaskan bahwa norma-norma modern seputar seksualitas, hasrat, dan kesenangan bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan dibentuk melalui produksi wacana oleh rezim kekuasaan untuk menyelaraskan tujuan sosial dan politik.

Kekuasaan dan Pengetahuan

Foucault berargumen bahwa pengetahuan dan kekuasaan adalah dua hal yang saling terkait. Pengetahuan menjadi dasar legitimasi kekuasaan, dan kekuasaan memungkinkan produksi pengetahuan tertentu yang mendukung kepentingannya. Siapa pun yang menguasai pengetahuan, berpotensi mengarahkan kebijakan dan keputusan publik secara hegemonik.

Kekuasaan Berdaulat dan Kekuasaan Disipliner

Dalam *Discipline and Punish*, Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan pada masa pra-industri dijalankan secara represif dan langsung, seperti hukuman fisik di ruang publik. Namun, dalam masyarakat modern, kekuasaan bekerja secara lebih tersembunyi melalui institusi pendidikan, militer, dan hukum.

Panoptikon dan Pengawasan

Panoptikon adalah metafora Foucault untuk menjelaskan sistem pengawasan modern. Ia menggambarkan masyarakat yang selalu merasa diawasi, sehingga membentuk perilaku patuh secara internal tanpa paksaan langsung. Ini menjadi dasar kontrol sosial yang efektif dan tidak terlihat.

Pemerintahan dan Biopower

Biopower merujuk pada praktik pengelolaan populasi oleh negara atau lembaga melalui kebijakan yang mengatur tubuh, kesehatan, dan kehidupan warganya. BRICS dapat dilihat sebagai arena diskursif tempat negara-negara Global South mencoba membentuk biopolitik alternatif yang lebih adil dan multipolar.

Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Posisi dalam Forum Internasional dan Aspirasi Multipolar

Sebelum resmi bergabung dengan BRICS, Indonesia telah menunjukkan ketertarikan melalui partisipasi dalam berbagai dialog dan kerja sama dengan negara anggota (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Langkah ini mencerminkan strategi diplomasi bebas-aktif Indonesia, serta upaya untuk memperluas ruang gerak di luar blok tradisional Barat.

Melalui pendekatan diskursus Foucault, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dapat dibaca sebagai bentuk produksi makna politik baru: resistensi terhadap dominasi global, serta artikulasi identitas nasional sebagai aktor independen dan strategis dalam tatanan dunia multipolar. Diskursus seperti "kemitraan setara", "alternatif terhadap unipolaritas", dan "solidaritas Selatan-Selatan" menunjukkan bagaimana bahasa dan simbol menjadi alat dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Dalam kerangka relasi kuasa ala Foucault, Indonesia:

- Berupaya mendistribusikan ulang kekuasaan global.
- Mempengaruhi norma dan institusi internasional.
- Menghindari subordinasi dalam sistem global yang selama ini dikendalikan oleh kekuatan Barat.

Diskursus multipolaritas juga berfungsi sebagai strategi untuk membangun subjektivitas geopolitik Indonesia yang lebih mandiri. Dengan kata lain, melalui BRICS, Indonesia tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga membentuk ulang identitas dan peranannya di kancah internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka analisis diskursus Foucauldian. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana wacana mengenai keanggotaan Indonesia dalam BRICS dikonstruksi, disebarluaskan, dan dinegosiasikan dalam ruang publik serta kebijakan luar negeri. Analisis diskursus Foucauldian memungkinkan telaah terhadap praktik-praktik wacana sebagai bentuk relasi kuasa, serta cara negara membentuk identitas dan posisinya dalam tatanan internasional melalui bahasa, simbol, dan narasi.

Data yang digunakan bersifat kualitatif tekstual, diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap sumber primer dan sekunder. Sumber data utama meliputi:

- Dokumen resmi pemerintah Indonesia terkait kebijakan luar negeri dan proses keanggotaan BRICS (rencana strategis, siaran pers, dan laporan diplomatik).

- Pernyataan dan pidato pejabat negara, khususnya dari Kementerian Luar Negeri, Presiden RI, dan perwakilan diplomatik Indonesia dalam forum internasional.
- Pemberitaan media nasional dan internasional, termasuk editorial, opini analisis, serta laporan think-tank yang membahas dinamika keanggotaan Indonesia dalam BRICS.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran arsip digital dari situs-situs resmi pemerintah (Kemlu RI, Setneg), media kredibel (Kompas, The Jakarta Post, CNBC Indonesia), dan lembaga kajian seperti CSIS dan FPCI.

Proses analisis dilakukan dengan pendekatan **diskursus Foucauldian**, yang berfokus pada bagaimana kekuasaan dan pengetahuan diproduksi melalui teks dan narasi. Tahapan analisis meliputi:

1. Identifikasi Formasi Diskursif Dominan

- Mengidentifikasi narasi utama dalam dokumen resmi dan pernyataan publik tentang BRICS dan Indonesia.
- Menelaah bagaimana wacana multipolaritas, kerja sama Selatan-Selatan, dan keadilan global dikonstruksi oleh aktor negara.

2. Analisis Arkeologis

- Melacak kemunculan dan transformasi wacana BRICS dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.
- Menelusuri konteks historis, sosial, dan politik yang membentuk wacana tersebut dari masa ke masa.

3. Analisis Genealogis

- Mengungkap relasi kekuasaan yang memengaruhi pembentukan dan reproduksi wacana tentang BRICS.
- Menganalisis interaksi antara produksi pengetahuan dan distribusi kekuasaan global, serta dampaknya terhadap posisi Indonesia.

4. Interpretasi Diskursus

- Menginterpretasikan bagaimana wacana-wacana yang terbentuk memengaruhi pemahaman publik, formulasi kebijakan luar negeri, serta pembentukan identitas Indonesia sebagai aktor global.
- Menelaah bagaimana Indonesia menggunakan wacana multipolaritas untuk memperkuat posisi strategisnya dalam sistem internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Formasi Diskursif Dominan

a. Diskursus “Negara Berkembang” dan Aspirasi Global Selatan

BRICS diposisikan sebagai forum negara-negara berkembang yang menantang dominasi sistem ekonomi global yang cenderung menguntungkan negara Barat. Wacana ini menempatkan Indonesia sebagai bagian dari *Global South* dengan legitimasi untuk ikut menentukan arah tata ekonomi global. Posisi strategis

Indonesia sebagai negara besar dengan sumber daya alam melimpah dan lokasi geografis yang penting turut memperkuat diskursus tersebut.

b. Diskursus “Kekuatan Ekonomi Baru” dan Potensi Indonesia

Narasi tentang *emerging economies* mengafirmasi peran Indonesia sebagai kekuatan ekonomi baru yang layak berada dalam lingkaran elite global. Data ekonomi makro dan daya beli domestik Indonesia menjadi dasar dari wacana ini. Namun, potensi eksploitasi atau subordinasi dalam aliansi BRICS tetap menjadi perhatian kritis.

c. Diskursus “Tatanan Dunia Multipolar” sebagai Alternatif

BRICS dipandang sebagai resistensi terhadap tatanan dunia unipolar yang dikendalikan oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS dipahami sebagai afirmasi terhadap dunia multipolar yang menjamin kemandirian dan ruang manuver kebijakan luar negeri Indonesia.

d. Diskursus “Kemitraan Strategis” dan Keuntungan Keanggotaan

Wacana kerja sama Selatan-Selatan (South-South Cooperation), teknologi, dan pembangunan berkelanjutan memperkuat legitimasi Indonesia sebagai anggota BRICS. Indonesia memosisikan dirinya sebagai mitra strategis yang diuntungkan secara ekonomi dan politik melalui solidaritas dengan negara-negara non-Barat.

2. Analisis Arkeologis Diskursus

- 1960–1980: Retorika Global South berkembang sejak Konferensi Asia Afrika dan G77. Indonesia tampil sebagai pelopor.
- 1990–2000: Dominasi diskursus neoliberalisme melalui IMF dan WB menjadikan Indonesia sebagai “murid” globalisasi ekonomi.
- 2009–2023: Munculnya BRICS sebagai kekuatan tandingan menginspirasi Indonesia untuk mencari jalur baru dalam diplomasi internasional.
- 2024–2025: Bergabungnya Indonesia ke BRICS menjadi artikulasi ulang peran Indonesia sebagai aktor strategis penghubung antara negara kecil dan kekuatan besar.

3. Analisis Genealogis Diskursus

Wacana tentang BRICS dan Indonesia dibentuk oleh dinamika kekuasaan antaranggota:

- Tiongkok dominan dalam BRICS, mendorong agenda alternatif terhadap Barat.
- Rusia menekankan resistensi terhadap dominasi AS dan NATO.

- India dan Tiongkok memiliki ketegangan geopolitik (perbatasan Ladakh, kecurigaan terhadap BRI).
- Indonesia mencari legitimasi global, menghindari ketergantungan pada Barat, dan memperluas mitra diplomatik.

Produksi makna dalam media elite nasional seperti *Kompas* dan *The Jakarta Post* turut menyebarkan wacana bahwa BRICS adalah wadah yang aman dan prospektif bagi Indonesia.

4. Implikasi Diskursus terhadap Kebijakan dan Identitas Indonesia

- Kebijakan Luar Negeri:
 - Penguatan diplomasi Selatan-Selatan.
 - Komitmen pada multilateralisme inklusif.
 - Perluasan ruang manuver strategis Indonesia di luar blok Barat.
- Identitas Global:
 - Indonesia mengonstruksi dirinya sebagai negara *middle power* yang memiliki otonomi strategis (*strategic autonomy*).
 - Upaya membangun citra sebagai pemimpin Global South melalui BRICS.

5. Potensi Kontradiksi dan Resistensi dalam Diskursus

- Kontradiksi:
 - Wacana negara berkembang vs realitas ekonomi kapitalistik Indonesia.
 - Ketidakseimbangan kekuasaan dalam BRICS (dominasi Tiongkok).
- Resistensi:
 - Kritik akademisi dan masyarakat sipil yang melihat BRICS sebagai elitisme baru.
 - Skeptisisme media Barat terhadap kapabilitas BRICS menggantikan tatanan internasional eksisting.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif menggunakan dan membentuk diskursus tertentu untuk memosisikan dirinya dalam tatanan dunia multipolar. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukan sekadar kebijakan luar negeri pragmatis, melainkan bentuk ekspresi politik identitas yang dibangun melalui wacana resistensi terhadap dominasi Barat.

Melalui pendekatan diskursus Foucauldian, terlihat bahwa kekuasaan dan pengetahuan diproduksi serta disebarakan melalui narasi-narasi seperti “*negara berkembang*”, “*kemitraan setara*”, “*emerging power*”, dan “*tatanan dunia multipolar*”. Wacana ini berperan penting dalam membentuk persepsi, legitimasi, dan arah kebijakan Indonesia di level global.

Indonesia menggunakan BRICS untuk memperkuat posisinya sebagai middle power dengan otonomi strategis. Melalui forum ini, Indonesia tidak hanya memperluas jejaring ekonomi-politik, tetapi juga mengartikulasikan aspirasi geopolitik sebagai aktor non-Barat yang aktif, independen, dan progresif.

Namun, terdapat tantangan dalam bentuk kontradiksi internal BRICS, dominasi anggota tertentu (terutama Tiongkok), serta skeptisisme media dan akademisi terhadap kompatibilitas BRICS sebagai alternatif tatanan global. Resistensi terhadap diskursus hegemonik lama tetap memerlukan kehati-hatian dan kemampuan Indonesia dalam memainkan diplomasi wacana secara strategis.

SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk:

1. Menelusuri diskursus serupa dalam konteks forum internasional lain seperti G20, Indo-Pacific Forum, atau ASEAN.
2. Melakukan studi komparatif antar negara yang juga dipertimbangkan untuk bergabung dengan BRICS, seperti Arab Saudi atau Argentina.
3. Mengintegrasikan pendekatan diskursus Foucauldian dengan metode etnografi diplomatik dan analisis media untuk memahami dinamika pembentukan makna secara lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- brasil govermen . (2025, jan 06). Indonesia as a new member of BRICS. hal. 0.
- the ministry of foreign affairs of the Russia federation . (2025 , january 9). detail BRICS .
- peessoa, g. s. (2025 , january 7). Indonesia is admitted to the BRICS bloc of developing nations.
- yaroslav lissoboliki, B. A. (2025 , january 6). Indonesia becomes a full-fledged BRICS member.
- amitav, a. (2014). *global international relation and regional worlds*. international studies quarterly.
- world bank. (2023). *IMF economic outlook*.
- flockhart, t. (2016). *the coming multiorder world*.
- kementrian luar negeri indonesia. (2025). *Menlu RI Pertegas Pentingnya Penegakan Hukum Internasional dan Reformasi Tata Kelola Global di Pertemuan BRICS*. kemlu.go.id.
- foucaults, m. (1972). *the archeology of knowlage* .
- guang, a. a. (2012). *BRICS and the shift in global power* .
- sukma, r. (2009). *indonesia quest for regional order*.
- higgott, r. (2007). *critical theory and the political economy of globalisation*.
- bond, p. (2013). *Subimperialism as Lubricant of Neoliberalism: South Africa's Role in BRICS*.
- saskia sassen, (. (2007). *A Sociology of Globalization*. (t.thn.).